



UNIVERSITAS MATARAM

DASAR-DASAR KEBIJAKAN KEHUTANAN

PRINSIP DASAR KEBIJAKAN KEHUTANAN

Pertemuan #3

Dalam penyusunan kebijakan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pilar dalam substansi dan materi kebijakan.

Oleh
Prof. Markum



www.markumgitu.com



087865740044





UNIVERSITAS MATARAM

SPIRAL KEBIJAKAN

Problematis

Dalam dinamika sosial akan terus terjadi perubahan-perubahan yang dipicu oleh adanya kebutuhan, masalah dan disharmoni



Landasan

Perubahan memiliki landasan yang sifatnya normatif maupun empiris. Normatif terkait dengan norma hukum dan empiris terkait dengan fenomena

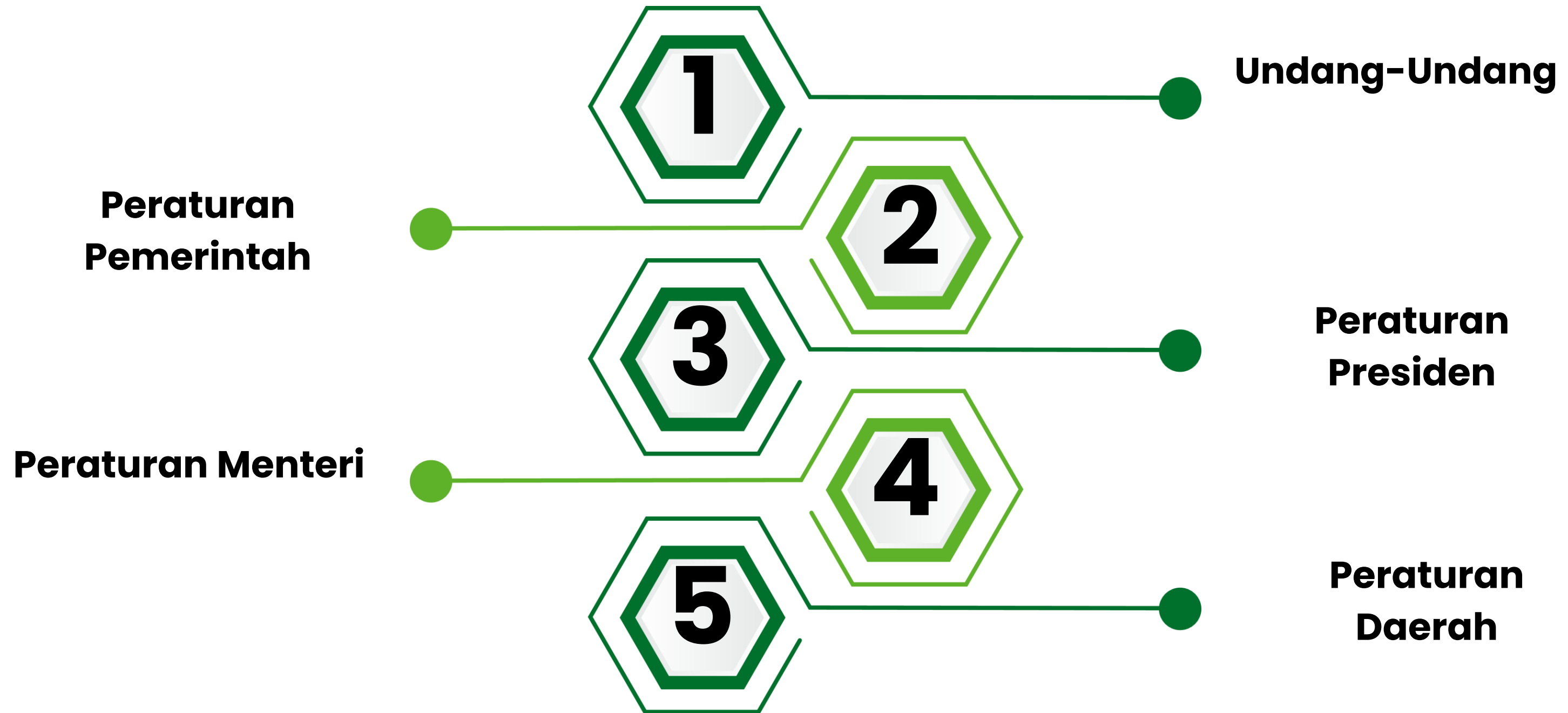
Produk Kebijakan

Dinamika tersebut melahirkan tujuan-tujuan strategis yang dirumuskan dalam produk kebijakan



UNIVERSITAS MATARAM

HIRARKI PERATURAN KEBIJAKAN DI INDONESIA





UNIVERSITAS MATARAM

PRINSIP DASAR KEBIJAKAN KEHUTANAN



Kehati-hatian

Setiap tindakan akan berdampak luas



Kesejahteraan

Mendorong terciptanya kemakmuran



Keberlanjutan

Mempertimbangkan generasi akan datang



UNIVERSITAS MATARAM

KOMPONEN DALAM KEBIJAKAN





UNIVERSITAS MATARAM

LANDASAN KEBIJAKAN KEHUTANAN

» FILOSOFIS

» SOSIOLOGIS

» YURIDIS

» EKOLOGIS

» METODOLOGI

Kelima landasan ini menjadi pertimbangan-pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan terkait kehutanan pada khususnya dan lingkungan pada umumnya





UNIVERSITAS MATARAM

LANDASAN FILOSOFIS



Bahwa setiap produk kebijakan dibuat untuk memberikan landasan bagi keberlangsungan suatu sistem, agar sistem tersebut dapat berjalan secara harmoni, selaras, meredam atau mencegah terjadinya konflik, tidak memicu terjadinya konflik



UNIVERSITAS MATARAM



LANDASAN SOSIOLOGIS

Produk kebijakan harus memberikan asas keadilan yang sepadan yang dirasakan oleh masyarakat, tidak memihak pada salah satu kepentingan pihak-pihak tertentu.





UNIVERSITAS MATARAM

LANDASAN YURIDIS



Bahwa setiap produk kebijakan harus mengacu pada produk kebijakan dan peraturan perundangan yang lain, sehingga produk kebijakan konsisten dan tidak bertabrakan dengan kebijakan yang lebih tinggi, yang bisa mengandung inkonsistensi hukum





UNIVERSITAS MATARAM

LANDASAN EKOLOGIS

Produk kebijakan haruslah mempertimbangkan faktor lingkungan yang rentan. Perubahan satu hal akan berakibat pada banyak hal. Upaya-upaya konservasi, perlindungan dan pengawetan menjadi pertimbangan yang kuat dalam konteks ini

EKOLOGI

Berkaitan dengan landscape, DAS, perlindungan, pelestarian, menuju pada kehidupan harmoni





UNIVERSITAS MATARAM



LANDASAN METODOLOGI

Bagaimana proses kebijakan dibuat,
apakah melibatkan publik, ataukah
hanya kalangan tertentu/terbatas

METODOLOGI



Perangkat



Proses



Partisipasi



Kompromi



UNIVERSITAS MATARAM

TERIMA KASIH

LOVE YOU ALL

Sampai jumpa pada perkuliahan
minggu depan

Contact Us



087865740044



www.markumgitu.com



markum.exp@gmail.com



MATERI DISKUSI



1. Apakah kebijakan kehutanan pada masa kolonial
 - Belanda mempengaruhi struktur pengelolaan hutan saat ini?
2. Apa dampak utama dari kebijakan kehutanan di era Orde Baru terhadap kondisi hutan di Indonesia?
3. Jelaskan perbedaan mendasar antara kebijakan kehutanan pada masa Orde Lama dan masa Reformasi!
4. Apakah kebijakan perhutanan sosial dalam era kontemporer membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan?
5. Menurut Anda, apakah kebijakan kehutanan di Indonesia sudah efektif mengendalikan perlindungan hutan ?

TUGAS#1

Tugas untuk memperdalam pemahaman tentang prinsip dasar perumusan kebijakan kehutanan.



Baca UU No. 41 Tahun 1999

Baca semua isi dalam undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.



Penelaahan

Silahkan dieksplorasi, pernyataan mana yang mendukung 5 prinsip dasar kebijakan yang sudah disampaikan



Mendeskripsikan

Silahkan deskripsikan hasil penelaahan dalam narasi, diketik format kertas A4, font Calibri Body 12.